

Acuan Pembangunan, Pemda Ingatkan Wali Nagari Tampilkan Data Akurat dan Lengkap

Fernando Yudistira - PESEL.KABARTERBARU.CO.ID

Dec 7, 2021 - 13:01



PESEL-Karena potensi nagari akan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan di daerah, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan, maka kepada semua wali nagari diingatkan agar menampilkan data nagari secara akurat dan lengkap.

Hal itu disampaikan sekretaris kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska, Selasa (7/12/2022) di Painan.

"Saya ingatkan wali nagari sebagai pemerintahan terendah agar memberikan data nagari secara akurat sesuai dengan kondisi lapangan, tanpa rekayasa dan dilakukan secara transparan. Sebab, data itu akan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan daerah," katanya.

Disebutkan, agar kegiatan pendataan potensi nagari sebagaimana dilakukan saat ini berjalan secara lancar, maka petugas pengolah data bersama pemerintah nagari juga diminta agar saling berkoordinasi supaya pendataan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ia berharap agar sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan prioritas sektoral lainnya menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam upaya untuk mendukung pembangunan nagari, pertumbuhan ekonomi skala nagari dan daerah.

"Dalam hal ini, seluruh perangkat daerah terkait mesti bersinergi dan saling berkoordinasi, sehingga pembangunan nagari dan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pintanya.

Dia juga berharap agar penerima program dan bantuan sosial harus tepat sasaran.

"Jangan program dan bantuan sosial itu diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, dan penyalurannya harus diawasi. Kemudian, pemerintah nagari mesti meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di nagari masing-masing," ucapnya.

Ditambahkan lagi bahwa pembangunan nagari dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan potensi dan produk unggulan nagari dan kawasan.

Kemudian perlu dilakukan penguatan peran kelembagaan pemerintahan, masyarakat, kelembagaan ekonomi dan lainnya.

Lalu, pembangunan dan peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat dan sebagainya.

"Terkait dengan penguatan peran pendampingan dan fasilitasi, difokuskan pada penerapan teknologi dan inovasi pembangunan. Caranya adalah dengan membangun kemitraan dan kerjasama antar lembaga yang ada di daerah," tutupnya. (rel/adi kumpai)